

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG TERHADAP  
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI KOTA PADANG PANJANG**

*(Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)*

Oleh :lk,

**AZRA NABILLA**  
**2010112161**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**Pembimbing :**

**Arfiani, S.H., M.H**  
**Henny Andriani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG TERHADAP  
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI KOTA PADANG PANJANG**

**ABSTRAK**

Pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh ASN Padang Panjang membuat citra buruk pada lingkup asn di Kota Padang Panjang. Adapun bentuk pelanggaran yang sering terjadi di pemerintahan Kota Padang Panjang, yaitu kewajiban masuk kerja dan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Pelanggaran tersebut mempengaruhi kinerja pemerintahan Kota Padang Panjang menjadi tidak maksimal dalam membawa dan melaksanakan peraturan dan kebijakan pemerintahan Kota Padang Panjang yang dimana bertujuan untuk memajukan daerah Kota Padang Panjang. Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, upaya untuk mewujudkan disiplin ASN di Kota Padang Panjang, lembaga yang berwenang yaitu BKPSDM Kota Padang Panjang. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat. *Pertama*, Bagaimana Mekanisme penegakan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin kerja di Kota Padang Panjang? *Kedua*, apa faktor penghambat dan pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kota Padang Panjang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa. *Pertama*, BKPSDM Kota Padang Panjang melakukan mekanisme penegakan hukuman bagi ASN yang melanggar disiplin kerja di Kota Padang Panjang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BKPSDM Kota Padang Panjang telah melakukan tahap pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai. *Kedua*, faktor penghambat BKPSDM Kota Padang Panjang dalam menegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kota Padang Panjang yaitu adanya beberapa oknum ASN yang sudah dijatuhi hukuman namun tetap mengulangi kesalahan yang sama, pimpinan yang tidak melaporkan adanya pelanggaran, dan kebijakan pimpinan. Faktor pendukung BKPSDM Kota Padang Panjang dalam menegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kota Padang Panjang yaitu adanya laporan masyarakat dan dibentuk Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.